KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

DS:0013-2673-5839-6125

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026

NOMOR : SP DIPA- 005.05.2.403429/2026

Revisi ke 06
Tanggal : 09 Oktober 2026

A. Dasar Hukum:

1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

3.UU No. 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	:	(005)	MAHKAMAH AGUNG
2. Unit Organisasi	:	(05)	Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)
3. Provinsi	:	(30)	KEP. BANGKA BELITUNG
4. Kode/Nama Satker	:	(403429)	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG
Sebesar	:	Rp. 52.021.000	(LIMA PULUH DUA JUTA DUA PULUH SATU RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.04	PERADILAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :		Jumlah Uang	
005.05.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp.	52.021.000
005.05.BF.1059	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	Rp.	52.021.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	52.021.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP	Rp.		- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN PANGKAL PINANG (015) Rp. 52.021.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

Jakarta, 01 Desember 2025
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
SUDARTO
NIP. 196904091989121001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 005.05.2.403429/2026
I A. INFORMASI KINERJA

DS:0013-2673-5839-6125

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (05) Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)
Provinsi : (30) KEP. BANGKA BELITUNG
Kode/Nama Satker : (403429) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG

Program	: 005.05.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum				52.021.000
Kegiatan	: 1059	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara				52.021.000
Indikator Kinerja Kegiatan	: 1. 01	Jumlah Kegiatan Layanan Pengamanan Sidang di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara				
	2. 01	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Penyelesaian Perkara Tepat Waktu Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara				
	3. 01	Jumlah Perkara yang dilayani melalui Sidang di Luar Gedung Pengadilan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara				
	4. 01	Jumlah SDM Tenaga Teknis yang mengikuti Bimbingan Teknis di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara				
	5. 01	Jumlah kegiatan koordinasi dan pembinaan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara				
	6. 01	Jumlah pengguna layanan pos bantuan hukum di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara				
	7. 02	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Penyelesaian Perkara Tepat Waktu Tingkat Pertama di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara				
	8. 02	Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara				
	9. 03	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu oleh Pengadilan Tingkat Banding kepada Pengadilan Pengaju di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara				
	10. 04	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Penyediaan/Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu oleh Pengadilan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara				
	11. 05	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Pengiriman Petikan/Pemberitahuan Isi Putusan Tingkat Banding, Kasasi dan PK Secara Tepat Waktu oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara				
	12. 06	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Putusan Pengadilan yang Diunggah Pada Direktori Putusan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara				
	13. 07	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Perkara yang Menggunakan e-Court di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara				
	14. 08	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara				
Klasifikasi Rincian Output 1	: 1059.AEA	Koordinasi		1,00	kegiatan	1.587.000
Rincian Output	: 01 AEA.002	Dukungan Penyelesaian Perkara		1.00	kegiatan	1.587.000
Klasifikasi Rincian Output 2	: 1059.QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan		96,00	Orang	33.216.000
Rincian Output	: 01 QBA.001	Layanan Pos Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	(PN)	96.00	Orang	33.216.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 005.05.2.403429/2026
I A. INFORMASI KINERJA

DS:0013-2673-5839-6125

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (05) Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)
Provinsi : (30) KEP. BANGKA BELITUNG
Kode/Nama Satker : (403429) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG

Layanan Bantuan Hukum Perseorangan — Orang

Klasifikasi Rincian Output	3	:	1059.QCA	Perkara Hukum Perseorangan		1,00	Perkara, Berkas Perkara	17.218.000
Rincian Output		:	01	QCA.002	Perkara yang dilayani melalui sidang di luar gedung dilingkungan peradilan Tata Usaha Negara (PN)	1.00	Perkara	17.218.000

Jakarta, 01 Desember 2025
DIREKTUR JENDERAL BADILMILTUN

ttd.

Marsda TNI Dr. YUWONO AGUNG NUGROHO, S.H., M.H.
NRP. 525775

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 005.05.2.403429/2026

DS:0013-2673-5839-6125

I B. SUMBER DANA

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (05) Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)
Provinsi : (30) KEP. BANGKA BELITUNG
Kode/Nama Satker : (403429) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG

		Pagu	Ekuivalen Rupiah
1. Anggaran Tahun 2026	Rp. 52.021.000		
1. Rupiah Murni	Rp. 52.021.000		
2. PNBP	Rp.		
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp. 0		
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp. 0		
5. Hibah Langsung	Rp. 0		
6. SBSN PBS	Rp. 0		
2. Rincian Pinjaman / Hibah :			

Ket :

a. Pinjaman Luar Negeri	(1) Valuta Asing	US$	0	Rp.	0
	(2) RPLN	US$	0	Rp.	0
b. Hibah Luar Negeri	(1) Valuta Asing	US$	0	Rp.	0
	(2) RHLN	US$	0	Rp.	0
c. Pinjaman Dalam Negeri		IDR	0		
d. Hibah Dalam Negeri		IDR	0		
e. Hibah Luar Negeri Langsung		IDR	0		
f. Hibah Dalam Negeri Langsung		IDR	0		

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register 1. Pinjaman Luar Negeri 2. Hibah Luar Negeri 3. Pinjaman Dalam Negeri 4. Hibah Dalam Negeri		PAGU TAHUN INI 1) Mata Uang NPP/H 2) Ekuivalen USD 3) Ekuivalen Rupiah		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN 1) PP 2) PL 3) RK 4) LC 5) -		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 005.05.2.403429/2026

DS:0013-2673-5839-6125

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (05) Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)
Provinsi : (30) KEP. BANGKA BELITUNG
Kode/Nama Satker : (403429) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG
Kewenangan : (KD)

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
403429	**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG**	**-**	**52.021**	**-**	**-**	**-**	**52.021**		
005.05.BF	**Program Penegakan dan Pelayanan Hukum**	**-**	**52.021**	**-**	**-**	**-**	**52.021**		
1059	**Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara**	**-**	**52.021**	**-**	**-**	**-**	**52.021**		
1059.AEA	Koordinasi	-	1.587	-	-	-	1.587	30 . 51	
	(30.51 KEP. BANGKA BELITUNG / KOTA PANGKALPINANG)								
01	RM	-	1.587	-	-	-	1.587	015	
1059.QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan	-	33.216	-	-	-	33.216	30 . 51	
	(30.51 KEP. BANGKA BELITUNG / KOTA PANGKALPINANG)								
01	RM	-	33.216	-	-	-	33.216	015	
1059.QCA	Perkara Hukum Perseorangan	-	17.218	-	-	-	17.218	30 . 51	
	(30.51 KEP. BANGKA BELITUNG / KOTA PANGKALPINANG)								
01	RM	-	17.218	-	-	-	17.218	015	
	JUMLAH	**-**	**52.021**	**-**	**-**	**-**	**52.021**		

Jakarta, 01 Desember 2025
DIREKTUR JENDERAL BADILMILTUN

ttd.
Marsda TNI Dr. YUWONO AGUNG NUGROHO, S.H., M.H.
NRP. 525775

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 005.05.2.403429/2026
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

DS:0013-2673-5839-6125

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (05) Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)
Provinsi : (30) KEP. BANGKA BELITUNG
Kode/Nama Satker : (403429) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG

(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	**403429**	**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG**													
		RENCANA PENARIKAN DANA	1.000	20.018	2.950	3.239	4.217	3.287	2.910	2.400	2.400	9.600	0	0	52.021
		BELANJA BARANG	1.000	20.018	2.950	3.239	4.217	3.287	2.910	2.400	2.400	9.600	0	0	52.021
	005.05.BF.1059	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	1.000	20.018	2.950	3.239	4.217	3.287	2.910	2.400	2.400	9.600	0	0	52.021
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	1.000	20.018	2.950	3.239	4.217	3.287	2.910	2.400	2.400	9.600	0	0	52.021
		PERKIRAAN PENERIMAAN	544	544	544	544	544	544	544	544	544	544	544	550	6.534
		- PNBP (425232)	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	64	790
		- PNBP (425233)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.200
		- PNBP (425239)	378	378	378	378	378	378	378	378	378	378	378	386	4.544

Jakarta, 01 Desember 2025
DIREKTUR JENDERAL BADILMILTUN

ttd.
Marsda TNI Dr. YUWONO AGUNG NUGROHO, S.H., M.H.
NRP. 525775

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 005.05.2.403429/2026
IV A. B L O K I R

DS:0013-2673-5839-6125

Kementerian Negara/Lembaga : [005] MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : [05] Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)
Provinsi : [30] KEP. BANGKA BELITUNG
Kode dan Nama Satker : [403429] PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 01 Desember 2025
DIREKTUR JENDERAL BADILMILTUN

ttd.
Marsda TNI Dr. YUWONO AGUNG NUGROHO, S.H., M.H.
NRP. 525775

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 005.05.2.403429/2026
IV B. C A T A T A N

DS:0013-2673-5839-6125

Kementerian Negara/Lembaga : [005] MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : [05] Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)
Provinsi : [30] KEP. BANGKA BELITUNG
Kode dan Nama Satker : [403429] PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 01 Desember 2025
DIREKTUR JENDERAL BADILMILTUN

ttd.
Marsda TNI Dr. YUWONO AGUNG NUGROHO, S.H., M.H.
NRP. 525775